

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendiskripsikan hubungan antara pemegang saham yang disebut dengan *principal* dan manajemen yang disebut sebagai agen. *Principal* merupakan pemilik perusahaan yang bertugas untuk menyediakan segala kebutuhan dana ataupun fasilitas yang dibutuhkan oleh operasional perusahaan, sedangkan agen merupakan seseorang yang dipilih lalu dikontrak untuk diberikan wewenang mengelola perusahaan sebaik mungkin. Jensen dan Mackling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak yang mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan orang lain agen (manajer) untuk menjalankan aktifitas perusahaannya.

Dalam praktek sesungguhnya, agen selaku manajer perusahaan seringkali bertindak tidak sesuai aturan kontrak. Dalam kontrak agen diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin dan memberikan keuntungan bagi *principal* selaku pemilik saham, namun kenyataanya justru agen melanggar aturan kontrak. Dalam mengambil keputusan yang seharusnya didasarkan pada kepentingan perusahaan, agen justru cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepada kepentingan pribadi. Para manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya ditanggung oleh pihak lain (Haryono, 2005). Masalah keagenan dapat disebabkan

terjadi karena adanya pandangan agen bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan yang menanggung kerugian sepenuhnya adalah *principal*, sehingga agen dapat dengan leluasa melakukan pengambilan keputusan menurut kepentingan pribadi

Pengungkapan menjadi faktor penting yang mampu mengurangi konflik antara agen dan *principal*. Agen tidak lagi bisa dengan leluasa membuat keputusan yang merugikan perusahaan. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan kepentingan pemilik saham ataupun kondisi perusahaan

2. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa dalam operasi perusahaan tidak tergantung untuk mencapai tujuan perusahaan saja, tetapi perusahaan dituntut untuk memberikan manfaat atau timbal balik kepada *stakeholder*. *Stakeholder* disini adalah pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan yang terdiri dari pemilik saham, kreditur, konsumen, pemerintah, masyarakat dan masih banyak lagi. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap ataupun tidak suatu informasi dalam laporan perusahaan.

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam menciptakan nilai sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

Perusahaan dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*, karena semakin bagus hubungan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap ketepatan pencapaian tujuan perusahaan. Untuk menjaga hubungan dengan *stakeholder* dapat dilakukan dengan melakukan pengungkapan laporan perusahaan, karena *stakeholder* memiliki kebutuhan untuk mengetahui seberapa baik atau buruknya kondisi perusahaan. Pengungkapan risiko sebagai salah satu praktik pengungkapan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder* nya (Taures, 2010).

Perusahaan yang mengungkap lebih banyak informasi risiko, akan menemukan bahwa pasar mengerti lebih baik mengenai posisi risiko perusahaan dan perusahaan kemudian dianggap berisiko lebih kecil dari sebelumnya (Ruwita, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan risiko lebih luas dapat dikatakan lebih tidak berisiko karena kemampuan dalam mengelola risiko perusahaan di masa yang akan datang.

3. Pengungkapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu langkah penyelesaian masalah yang mungkin akan dihadapi menyangkut risiko yang akan mengancam aset perusahaan. Menurut Smith (1990) manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Menurut Darmawi (2005)

manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :

- a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan
- b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba
- c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung
- d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non-material bagi perusahaan itu
- e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan *public image*

Semakin berkembangnya zaman berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di dunia yang secara langsung membuat permasalahan yang ada di perusahaan pun semakin meningkat dan beragam, adanya pengungkapan manajemen risiko diharapkan mampu memberikan bantuan penyelesaian dan pencegahan masalah yang mungkin di suatu saat akan dihadapi perusahaan. Pentingnya pelaporan terhadap risiko telah dimulai awal tahun 1998 ketika *Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)* menerbitkan tulisan hasil diskusi berjudul “*Financial Reporting of Risk-Proposals for statement of Business Risk*” (Amran *et al*, 2009). Fokus dalam *risk disclosure* meningkat sejak munculnya introduction IFRS 7, 1 Januari 2007 (Kruk, 2009). Di tahun 2007, dunia dilanda krisis keuangan internasional yang disebut krisis kredit

dan saat itu ketertarikan terhadap pengungkapan risiko pun semakin meningkat (Oorschot, 2009).

Salah satu faktor dalam pengungkapan perusahaan adalah pengungkapan manajemen risiko. Pengungkapan risiko yaitu suatu upaya perusahaan untuk memberi informasi kepada pengguna laporan tahunan ataupun calon investor mengenai apa yang mengancam perusahaan, sehingga dapat dijadikan faktor pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Almilia, 2013).

Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimal yang sudah ditentukan oleh standar akuntansi, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pilihan bebas dari manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada investor ataupun pihak yang membutuhkan untuk melakukan keputusan pengambilan investasi. Perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur, yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang (Linsley dan Shrives, 2006)

4. Dewan Komisaris

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan berperan terhadap aktivitas pengawasan. Dengan peran dewan komisaris tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengungkapan risiko oleh manajemen melalui fungsi monitoring atas program manajemen risiko yang efektif. Ukuran dewan

yang besar berpengaruh terhadap kurangnya pengaruh manajer sehingga dewan dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif (Jatiningrum, 2011).

Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Status dewan komisaris ini dipilih atau diberhentikan sesuai dengan keputusan perusahaan yang mengacu pada kinerja yang dilakukan. Untuk memberikan kinerja yang baik maka dewan komisaris dituntut untuk melakukan pengawasan secara intensif. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas jalanya pengurusan Perseroan oleh Direksi serta memberikan persetujuan dan pengesahan atas rencana kerja dan anggaran tahun Perseroan
- b. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala untuk membahas pengelolaan operasional Perseroan
- c. Mengawasi pengelolaan Perseroan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi dan memberikan masukan jika diperlukan
- d. Menominasikan dan menunjuk calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dan disetujui dalam RUPS tahunan
- e. Menentukan jumlah remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, berlandaskan pada wewenang yang diberikan pada RUPS tahunan
- f. Menunjuk dan menetapkan anggota Komite Audit (id.kalbe.co.id)

5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan. Bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku kecurangan ataupun manipulasi salah satunya dalam pengungkapan laporan tahunan dan memberikan saran ataupun masukan terhadap langkah kelanjutan jangka pendek ataupun jangka panjang perusahaan. Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung lebih memperhatikan risiko dan memandang pembentukan RMC (*Risk Management Commite*) sebagai sumber daya penting dalam membantu mereka menghadapi tanggung jawab pengawasan manajemen risiko dibanding perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang rendah (Carson 2002; Chen *et al.* 2009). Dalam menghadapi suatu masalah ataupun risiko di perusahaan, atas informasi yang telah didapat maka dewan komisaris juga dituntut untuk memberi solusi penyelesaian masalah yang lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan.

6. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan perusahaan. Komite audit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance* (Ruwita, 2012). Komite audit bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan.

Bertindak secara independen merupakan tuntutan bagi komite audit sebagai penghubung antara auditor eksternal dengan perusahaan. Tujuan komite audit yaitu membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.

7. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ataupun institusi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer. Porsi saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah atau institusi menyebabkan tingkat pengawasan kinerja manajemen perusahaan akan meningkat. Semakin besar saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maka semakin besar porsi suara pemilik saham dalam mengatur dan melakukan pengawasan bagi perusahaan.

8. Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber yang dimiliki seperti aset ataupun ekuitas (Taures, 2010). Profitabilitas adalah ukuran perusahaan melalui profit ataupun besar laba yang didapatkan perusahaan pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai profit ataupun besar laba maka profitabilitas perusahaan semakin tinggi. Penilaian mengenai profitabilitas dilakukan dengan menggunakan laporan neraca dan laba rugi dalam laporan keuangan, lalu

dilakukan analisis rasio yang menghasilkan rasio untuk menjadi standar penilaian bidang tertentu. Hasil profitabilitas juga dapat dijadikan tolak ukur sebagai penilaian efektivitas kinerja yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Efektivitas kinerja manajer dapat diketahui dari berapa jumlah atau pendapatan yang didapatkan dan berapa pengeluaran investasi

9. Leverage

Leverage adalah pengukur seberapa besar komposisi aktiva perusahaan yang dibiayai oleh pihak ketiga atau hutang. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung memiliki biaya agensi yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan leverage tinggi cenderung untuk memiliki risiko going concern yang tinggi (Subramaniam *et al.* 2009). Kondisi dan sifat manajer perusahaan pun juga berpengaruh terhadap tingkat *leverage*, semakin berani mengambil risiko maka tingkat *leverage* juga semakin tinggi.

10. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah seberapa besar sebuah perusahaan yang dapat diukur maupun dilihat dari total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan (Ruwita, 2012). *Agency theory* menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1967). Perusahaan dengan ukuran yang besar

senantiasa melakukan pengungkapan risiko yang lebih luas sebagai usaha untuk mengurangi biaya keagenan tersebut

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Jumlah dewan komisaris menggambarkan kemampuan berlebih dan keragaman informasi yang menyangkut dengan pengungkapan perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka berpengaruh terhadap pengawasan yang semakin ketat sehingga kualitas pengungkapan yang dihasilkan perusahaan semakin berkualitas. Jumlah anggota dewan yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi dan keahlian sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan manajemen risiko (Jatiningrum, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Mustaqim dkk (2013) memberikan hasil yang positif bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris yang ada di perusahaan akan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hasil ini didukung dengan penelitian dari Jatiningrum (2011), Abraham dan Cox serta Putri (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dengan demikian peneliti menduga, bahwa dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap hasil pengungkapan

manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

2. Proporsi Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Kehadiran komisaris independen memiliki nilai plus bagi perusahaan dari segi pengungkapan. Komisaris independen berasal dari pihak internal dan eksternal perusahaan, sehingga mampu memberikan masukan yang bersifat independen kepada anggota dewan dan hasil kontrol yang dilakukan bersifat netral dan tidak dapat diganggu gugat, selain itu komisaris independen mampu memberikan informasi pengungkapan yang lebih luas bagi publik. Semakin besar proporsi komisaris independen akan berdampak pada pengawasan perilaku manajemen untuk memenuhi keinginan pemegang saham dan tingkat pengungkapan manajemen risiko yang lebih luas.

Penelitian yang dilakukan Wardhana (2013) memberikan hasil positif bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Hal ini didukung oleh penelitian dari Desender (2007) dan Abraham dan Cox (2007) yang memberikan hasil positif terhadap hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan pengungkapan manajemen risiko. Namun penelitian yang dilakukan Putri (2014) memberikan hasil bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 2 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

3. Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Komite audit merupakan komite penunjang dewan komisaris. Komite audit diprediksi dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan yang lebih luas. Semakin banyak ukuran komite audit akan menghasilkan pelaporan bidang keuangan sesuai standar yang diterapkan untuk membantu memperluas pengungkapan manajemen risiko. Anggota Komite Audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan yang lebih mendalam untuk memahami permasalahan dan risiko serta prosedur yang diusulkan untuk mengatasi dan mendeteksi masalah dan risiko tersebut (Ruwita, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) memberikan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dengan demikian peneliti menduga, bahwa semakin besar ukuran komite audit akan memberikan hasil yang bagus terhadap penyajian laporan keuangan serta membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengungkapan secara menyeluruh. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 3 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

4. Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Porsi kepemilikan saham perusahaan yang lebih besar dimiliki oleh sebuah institusi ataupun pihak luar akan menyebabkan tingkat pengawasan yang dilakukan semakin tinggi karena institusi atau pihak luar memiliki suara yang besar dan dominan dalam mengatur jalannya perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005). Semakin tingginya jumlah investor institusional, maka akan terdapat peningkatan insentif bagi perusahaan untuk berperan aktif dalam *corporate governance*, termasuk dalam hal pengungkapan (Oktaviana, 2009).

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan dalam hal *monitoring* untuk mengawasi perilaku manajer yang kapan saja dapat melakukan kecurangan ataupun manipulasi mengenai informasi yang akan diungkapkan perusahaan. Karena adanya *monitoring* yang kuat maka manajer cenderung untuk tidak berbuat curang dan menghindari praktek manipulasi terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Kusumaningrum (2013) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko sehingga diharapkan dengan adanya

kepemilikan institusional yang besar membuat tingkat pengungkapan risiko juga semakin luas.

Dengan demikian, peneliti menduga bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan menghadirkan sistem kepemilikan yang terpusat. Kepemilikan yang porsinya lebih besar dimiliki oleh sebuah institusi atau pihak luar memberikan kekuatan suara yang lebih tinggi dalam mengatur perusahaan dan tingkat pengawasan yang lebih tinggi terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 4 yang diajukan peneliti adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

5. Tingkat Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Berdasarkan *agency theory*, profitabilitas merupakan suatu indikator ataupun cermin keadaan atau kondisi kemajuan sebuah perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka keadaan atau kondisi perusahaan semakin baik dan maju, namun jika tingkat profitabilitas semakin rendah maka keadaan atau kondisi perusahaan semakin buruk dan mundur. Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dimiliki sebuah perusahaan akan menyebabkan ketertarikan investor luar untuk membeli saham perusahaan, sehingga perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang luas khususnya pengungkapan manajemen risiko untuk lebih menarik dan meyakinkan investor luar dalam membeli saham perusahaan.

Hasil penelitian dari Aljifri dan Hussainey (2007) menemukan pengaruh positif antara tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko. Namun penelitian dari Anisa (2012) menemukan pengaruh negatif antara tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 5 yang diajukan peneliti adalah:

H₅: Tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

6. Tingkat *Leverage* Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

Tingkat *leverage* dapat menunjukkan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* dapat diartikan bahwa struktur modal perusahaan lebih dominan hutang dibandingkan ekuitasnya yang berdampak pada tuntutan pengungkapan yang semakin tinggi dari pihak luar. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang lebih tinggi di bandingkan struktur modal, kreditur dapat memaksa perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut (Amran *et al*, 2009). *Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh hutang. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan mengungkap lebih banyak risiko dengan tujuan untuk menyediakan penilaian dan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada perusahaan (Amran *et al*, 2009).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2012) dan Hasan (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif *leverage* terhadap pengungkapan manajemen risiko. Dengan demikian peneliti menduga, bahwa semakin besar

tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan menyebabkan tuntutan pengungkapan akan semakin besar dilakukan oleh pihak luar dan kreditor untuk mengetahui seberapa baik atau buruk kondisi dan kemampuan perusahaan melunasi hutangnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 6 yang diajukan peneliti adalah:

H₆: Tingkat *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

7. Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko

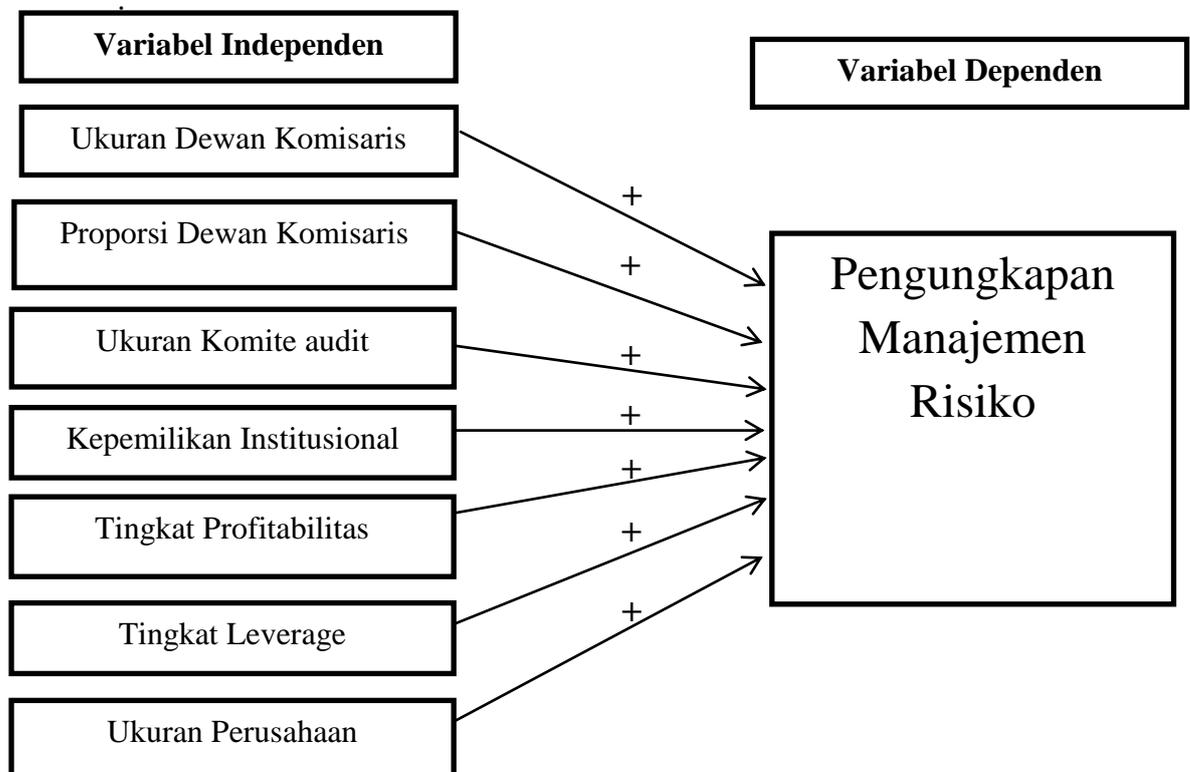
Agency theory menyatakan jika perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan kecil (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Almilia dan Retrinasari, 2007). Perusahaan besar mungkin akan melakukan pengungkapan lebih luas yang bertujuan untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Menurut Fitriani (2001) perusahaan besar memiliki kemampuan untuk merekrut karyawan yang sudah ahli serta adanya tuntutan lebih dari pemegang saham dan analisis, sehingga perusahaan besar memiliki inisiatif untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari perusahaan kecil. Mengungkapkan banyak informasi merupakan bagian dan upaya perusahaan dalam mewujudkan akuntabilitas public (Almilia dan Retrinasari, 2007). Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disoroti oleh publik pada umumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Ratnasari (2007), Amran *et al* (2009), dan Anisa (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis 7 yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₇: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian